

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kritik sosial merupakan salah satu bentuk kritik akademis atau yang berfokus pada permasalahan sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persepsi ketidakadilan dan relasi kekuasaan secara umum. Kritik sosial menganalisis struktur masyarakat yang dianggap cacat dan fokus pada solusi praktis melalui langkah-langkah spesifik, perubahan radikal atau bahkan perubahan revolusioner (Blanchard, 2022).

Kritik sosial dielaborasi melalui interpretasi keyakinan dan nilai bersama, dan penerapannya pada sistem sosial yang bermasalah dengan melalui diskusi bersama tentang apa yang sedang terjadi dan dianggap cukup relevan. Dalam praktik kritik sosial, isi pesan dari keyakinan bersama tentang apa yang sedang terjadi tidak pernah dialami sebagai masalah, satu-satunya dimensi permasalahan dari praktik kritik sosial yang menarik perhatian filsafat politik selalu berkaitan dengan konflik tentang keadilan masyarakat (Rennault, 2020).

Bentuk kritik sosial berkembang seiring dengan perubahan zaman dan teknologi. Saat ini, 'Meme' menjadi bentuk kritik sosial masyarakat dunia dalam format infografis untuk menyampaikan atau mengungkapkan suatu pendapat melalui media sosial. Clement (2020) dalam (Nieuburt, 2021) menjelaskan, 35% Gen Z dan pengguna media sosial berusia milenial secara statistik "sangat memungkinkan" untuk membagikan meme kepada orang lain, seperti halnya yang diungkapkan pihak Instagram dalam laman blog resmi miliknya, pada tahun 2020, lebih dari 1 juta postingan "meme" dibagikan ke Instagram setiap hari (Instagram, 2020).

Meme yang diunggah di media sosial adalah bentuk reaksi atas apa yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Meme mengangkat sisi lain dari suatu diskusi yang jauh dari kata anarkis karena mengandung desain grafis dan tulisan yang penuh sindiran menarik bagi pembacanya. Penampilan

desain grafis dan tulisan ini telah menjadi perhatian tersendiri sebagai alat untuk menyampaikan pesan melalui media sosial (Purwaningrum & Sudana, 2020).

Paparan meme meningkatkan perhatian politik dan membantu masyarakat dalam belajar tentang isu-isu politik di dunia digital. Hal ini mengarah pada efektivitas dan kepentingan politik. Dalam (Huntington, 2017) dijelaskan bahwa meme bersinggungan dengan budaya populer dan politik, meme berkontribusi pada pemikiran individu tentang masalah, atau tokoh politik yang digambarkan atau bahkan dengan partisipasi politiknya. Dengan demikian, meme dinilai memiliki efek pada opini atau perilaku politik melalui pemikiran seseorang.

Meme yang diunggah di media sosial adalah bentuk reaksi atas apa yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Meme mengangkat sisi lain dari suatu diskusi yang jauh dari kata anarkis karena mengandung desain grafis dan tulisan yang penuh sindiran menarik bagi pembacanya. Penampilan desain grafis dan tulisan ini telah menjadi perhatian tersendiri sebagai alat untuk menyampaikan pesan melalui media sosial (Purwaningrum & Sudana, 2020). Maka dari itu, meme mudah menjadi viral karena dianggap dapat mewakili kritik sosial dalam menyinggung seseorang atau kelompok.

Di Indonesia, meme politik berkembang beriringan dengan isu terkait politik. Dijelaskan dalam jurnal '*Meme Politik dalam Ruang Wacana Komunikasi Politik*' di Indonesia oleh (Prabawangi & Fatanti, 2021) sejak tahun 2014, fenomena komunikasi politik Indonesia mulai berubah, yaitu dengan menggunakan ruang maya sebagai ajang pertarungan ide, contohnya dalam Pilpres 2014, linimasa media sosial kerap dipenuhi dengan meme politik.

Meme politik mencakup opini massa dan memiliki dampak yang lebih dalam kepada audiens karena meme bersifat humor dan daya tariknya memikat. Maka dari itu, meme politik mudah menjadi viral karena dianggap dapat mewakili kritik sosial dalam menyinggung kebijakan publik.

Pembuat konten di seluruh spektrum media sosial saat ini memiliki kesempatan untuk menyebarluaskan satu gambar pada satu waktu. Selama meme diposting di waktu yang tepat, audiens yang tepat, dan dengan tagar yang benar, sebuah meme akan bertahan memiliki kesempatan untuk viral karena meme tersebut dilihat oleh pengguna media sosial lainnya yang memilih untuk menyuarakan apresiasi mereka (Cohen, 2019).

Meme politik tidak hanya menarik orang-orang yang aktif dalam berpolitik tetapi juga membantu dalam membentuk opini bagi mereka yang tidak berpartisipasi aktif dalam isu-isu dan diskusi politik. Dengan penyebaran yang begitu cepat meme politik dapat langsung tertuju kepada pemangku kebijakan.

Hal tersebut dijelaskan oleh (Denisova, 2019) bahwa para elit politik saat ini dapat mengontrol media tradisional dan bahkan mengatur kebebasan berbicara, namun mereka masih belum memadai untuk menahan penyebaran informasi dalam komunikasi daring, karena orang yang mungkin tidak tertarik atau terlibat langsung dengan informasi dan debat politik, mereka mungkin dengan mudah melihat informasi politik yang dikemas dengan kemasan meme di jejaring sosial.

Berbeda dengan media sosial, media tradisional atau media mainstream rawan ditunggangi oleh para pejabat publik, Rahadian (2018) dalam (Sukmayadi, 2019) menjelaskan 7 dari 12 media besar berafiliasi dengan dunia politik Indonesia, empat di antaranya merupakan ketua umum partai politik Indonesia. Hal ini menimbulkan persepsi umum bahwa kepentingan pemilik media telah membahayakan hak warga negara karena media telah menjadi mekanisme bagi politisi untuk menyampaikan kepentingan mereka.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, kritik di bidang politik dapat disalurkan melalui media baru. Meme politik hadir sebagai media alternatif baru dalam budaya kritik sosial masyarakat karena meme bisa diproduksi oleh siapa saja, akan tetapi dengan

tingkat kedinamisan meme politik itu sendiri malah menimbulkan masalah tidak keakuratan, etika, atau subjektivitas.

Meme bisa saja dianggap sebagai bentuk propaganda modern karena meme menyajikan pesan sederhana dengan menyampaikan “satu ide atau slogan yang tidak rumit”. Dijelaskan bahwa fakta dapat lebih mudah diabaikan. Ada ruang terbatas untuk berbagi informasi yang rinci atau menyajikan argumen kontra. Pesan yang disederhanakan ke dalam bentuk meme bisa sangat persuasif jika pembaca memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan tentang topik yang sedang dibahas (Klein, 2020).

Pada masa pandemi Covid-19, Abbas, dkk (2020) dalam (Nuryana, 2021) menjelaskan penggunaan sosial media selama pandemi Covid-19 menyoroti hubungan antara meme dan keefektifan dari program karantina dilaksanakan dijelaskan oleh (Sulistyaningtyas, Jaelani, & Suryani, 2020).

Meme politik penting digunakan sebagai wacana publik sebagai kritik sosial yang direpresentasikan masyarakat. Menganalisis meme memungkinkan untuk memahami bagaimana meme politik bekerja dan berkontribusi pada kebijakan publik atau tokoh politik yang masyarakat kritik. Oleh karena itu, penelitian terdahulu diperlukan sebagai pertimbangan peneliti dalam menemukan celah penelitian.

Penelitian yang menganalisis meme politik sebagai kritik dengan memfokuskan analisis pada meme yang ditujukan kepada tokoh pejabat publik kerap dilakukan (Dewi, Abdullah, Maryani, & Suganda, 2017) pada penelitiannya yang menganalisis meme politik populer dengan tagar #pilgubdki di Instagram. Analisis menunjukkan meme politik mengkritik secara langsung bukan hanya melalui sindiran. Tanda-tanda etnisitas, pandangan agama, isu rasial, dan upaya memutarbalikkan fakta digunakan untuk menyerang dan meruntuhkan lawan politik, terutama dalam mengkritisi kelemahan janji kampanye, bahasa yang digunakan, dan tutur kata.

Sama halnya dengan penelitian analisis semiotika terhadap meme mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam

keenam meme yang telah dianalisis, (Fista, 2022) menjelaskan Ahok ditampilkan sebagai tokoh kontroversial dengan kepribadian unik yang membuatnya dibenci namun dicintai pada saat yang bersamaan. Hal ini dikarenakan stigma karakter Ahok masih sangat kental dan melekat pada setiap tanda yang ada di meme politik tentang Ahok, seperti; terbiasa bertutur kasar, dan sulit menghargai perasaan orang lain masih menempel pada makna tanda yang terdapat di meme politik tersebut.

Penelitian lain juga menangkap citra Agus Harimurti Yudhoyono pada meme politik sebagaimana yang dijelaskan dalam (Purnawati, 2019) AHY digambarkan dalam meme politik sebagai tokoh berpenampilan menarik, berkepribadian baik sebagai anak yang berbakti, namun tidak mampu tegas dan kurang memiliki kemampuan di dunia politik, AHY dianggap sebagai korban dari pemerintahan SBY dalam kepentingan Partai Demokrat.

Karakteristik meme politik yang dibuat dalam upaya menyudutkan pihak-pihak tertentu dianalisis pada meme politik mengenai program 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf (Kullah, Tike, & Latief, 2021). Data utama berasal dari pengamatan langsung terhadap postingan meme yang diunggah ke Facebook. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk representasi ideologis atau mitos bahwa kebijakan yang diterapkan Jokowi dalam beberapa hal dipertanyakan dan dianggap kontroversial di kalangan publik, serta menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat, khususnya pengguna internet, terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sistem dan membuat kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.

Selanjutnya, dalam lingkup politik dunia, adapun penelitian analisis semiotika yang memfokuskan sasaran kritik kepada pejabat publik, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Mahasneh, 2021). Penelitian ini melibatkan analisis politik, sosial, dan humor dari enam sampel meme internet yang dipilih secara acak mengenai kunjungan Trump ke Arab Saudi pada tahun 2017. Dalam salah satu meme, Trump digambarkan sedang berbicara dengan sisi iblisnya sendiri. Trump, dalam meme ini digambarkan

seorang presiden sebenarnya yang menolak undangan Raja Salman karena Arab Saudi dianggap oleh pejabat AS bertanggung jawab atas peristiwa 9/11. Gambar dan teks tersebut menyampaikan pesan politik dari penjahat yang tampil ramah hingga menimbulkan kerugian.

Penelitian di atas merupakan beberapa contoh analisis semiotika yang dilakukan pada meme politik dengan pemfokusan kepada tokoh atau pejabat publik. Namun, meme tersebut dibuat berdasarkan adanya fenomena atau kebijakan tertentu yang mengakibatkan meme dilontarkan kepada tokoh. Oleh karena itu, diperlukannya temuan lain yang memfokuskan analisis semiotika meme politik terhadap suatu kebijakan publik agar target konstruksi simbol meme politik ditemukan.

Pengesahan RUU Cipta Kerja pada tahun 2020 membawa beberapa kreator meme politik menyuarakan pendapatnya. Akibat dari kebijakan publik tersebut muncul meme politik yang dianalisis menggunakan analisis semiotika pada penelitian meme politik dengan isi konten mengenai kondisi yang terjadi pada pengesahan RUU Ciptaker (Adha & Mahadian, 2021). Isi konten berupa demonstrasi serentak penolakan Omnibus Law, dan *trending topic* yang beredar mengenai kontra RUU Ciptaker pada media sosial Twitter. Dalam meme politik tersebut dimaknai pengesahan Omnibus Law oleh DPR menimbulkan kontra karena dinilai membebani masyarakat.

Analisis semiotika meme politik dengan pemfokusan kebijakan publik juga ditemukan terkait isu kebijakan pemungutan suara pengungsi di Amerika Serikat yang dinilai merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender dan agama (Lestari D. O., 2021). Dibuat di awal pemerintahan Donald Trump, meme *'Please Help Me: Contraceptive Pills'* berbicara tentang solusi pengurangan kemiskinan melalui kontrasepsi oleh wanita kulit putih senior. Masalah dalam meme tersebut adalah representasi kelompok antara perempuan kulit putih kelas menengah atas dan perempuan imigran kelas bawah. Hal ini memicu reaksi keras dari beberapa organisasi kemanusiaan, karena Amerika Serikat diyakini menolak untuk berpartisipasi dalam program penerimaan pengungsi.

Pada masa pandemi Covid-19 datang ke Indonesia, kebijakan publik PSBB diberlakukan. Hal ini mengakibatkan munculnya meme politik di ruang media sosial sebagai kritik terkait kebijakan tersebut. Salah satunya terkait pernyataan Presiden Jokowi bahwa mudik dan berkunjung ke kampung halaman merupakan dua hal yang berbeda. Pada penelitian berikut dijelaskan mudik dilakukan saat lebaran, sedangkan berkunjung ke kampung halaman dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan tertentu (Isnaniah & Agustina, 2020). Namun faktanya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V menjelaskan bahwa mudik atau berkunjung ke kampung halaman adalah suatu kegiatan pulang kampung. Jadi, keduanya memiliki arti yang sama tetapi konteksnya berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan politik, arti kata dalam kamus tidak berguna. Meme politik tersebut dimaknai dengan politisi bebas mendefinisikan arti kata tertentu demi kepentingan pemerintahan atau politik.

Sama halnya dengan mitos “*Work From Home*” tidak cocok untuk jenis pekerjaan tertentu di masyarakat Indonesia tercermin dalam sejumlah meme yang beredar di masa pandemi COVID-19. Pada penelitian berikut klasifikasi meme mengisyaratkan adanya opini di masyarakat bahwa kekurangan dari kebijakan publik “*Work From Home*” berdampak terhadap kelompok masyarakat tertentu (Widiastuti, Ismail, & Iswanto, 2020). Analisis penelitian ini menambah bukti lebih lanjut bahwa meme politik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berpotensi menjadi ruang publik untuk berbagai fungsi, salah satunya adalah ruang kritik politik.

Penelitian lain juga menganalisis meme politik kepada pemerintah terkait aturan kebijakan lockdown dengan kesan merendahkan tanpa memperhatikan bahaya virus corona (Kadri & Jumrah, 2022). Ketika media massa gencar memberitakan kebijakan lockdown, masyarakat malah gencar membuat meme erotis terkait seks pasangan saat lockdown. Begitu pula dengan maraknya kasus korupsi dana bansos, masyarakat membuat meme politik sebagai bentuk protes terhadap tidak adilnya distribusi kebutuhan pokok dan perbekalan bansos.

Temuan-temuan di atas mendukung bukti bahwa banyak penelitian yang menganalisis tentang meme politik terhadap pemangku kebijakan atau tokoh pemerintah dan penelitian yang memfokuskan meme politik terhadap kebijakan publik. Namun, belum ada kejelasan target konstruksi simbol dalam meme politik ditujukan.

Meskipun meme politik telah muncul sebagai media untuk mengkritik tanggapan pemerintah terhadap virus Covid-19, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam penerapan analisis semiotika untuk menguraikan elemen visual dan tekstual meme tersebut secara komprehensif. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan menggunakan semiotika sebagai alat analisis yang ampuh untuk menguraikan lapisan kompleks makna, simbolisme, dan referensi budaya yang tertanam dalam meme politik terkait tindakan pemerintah selama pandemi.

Dengan menggunakan analisis semiotika, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nuansa meme politik yang berfungsi sebagai bentuk kritik visual, cara meme politik mengkomunikasikan pesan sosial-politik, dan kontribusinya terhadap pemahaman kolektif pemerintah dalam penanganan Covid-19 di masa PPKM. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi potensi analisis semiotika dalam menjelaskan dimensi budaya, ideologi, dan psikologis dari meme-meme tersebut, sehingga meningkatkan pemahaman kita tentang pengaruhnya terhadap persepsi dan wacana publik.

Temuan-temuan ini memberikan fokus mengenai konstruksi meme politik yang pada akhirnya penelitian ini memetakan konstruksi meme politik diarahkan dan bagaimana meme tentang kebijakan publik dikonstruksi. Mengingat urgensi konten meme politik yang berpotensi menyesatkan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat dan mobilisasi politik pada kebijakan publik sehingga penelitian ini dapat memperkaya dari sisi tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis meme politik terkait kebijakan publik di Indonesia. Salah satu kebijakan publik yang ramai dikritik masyarakat saat pandemi Covid-19 berlangsung adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan

kebijakan pemerintah Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 dengan mengurangi mobilitas dan kegiatan masyarakat (Ramadhan, 2021). Abbas, dkk (2020) dalam (Nuryana, 2021) menjelaskan bahwa penggunaan media sosial selama pandemi Covid-19 menyoroti hubungan antara meme dan keefektifan dari pelaksanaan program karantina.

Analisis meme dalam penelitian memperkaya pemahaman tentang budaya digital dalam menyalurkan pendapat masyarakat melawan pemerintah. Maka dari itu, penelitian ini mengisi celah untuk memperdalam bagaimana isu representasi kritik dikonstruksi dalam suatu meme politik terhadap suatu kebijakan publik PPKM.

1.2 Rumusan Masalah

Dijelaskan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI (Universitas Pendidikan Indonesia, 2019) rumusan masalah memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang dan rasionalisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna denotasi terkait kritik pada meme politik kebijakan publik PPKM?
2. Bagaimana makna konotasi terkait kritik pada meme politik kebijakan publik PPKM?
3. Bagaimana makna mitos terkait kritik pada meme politik kebijakan publik PPKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan identifikasi tujuan khusus dari penelitian yang ingin dicapai (Universitas Pendidikan Indonesia, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna kritik dari meme politik terkait kebijakan PPKM 2021. Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Narasi makna kritik sosial pada meme politik PPKM yang dikonstruksi secara denotasi

2. Narasi makna kritik sosial pada meme politik PPKM yang dikonstruksi secara konotasi
3. Narasi makna kritik sosial pada meme politik PPKM yang dikonstruksi secara mitos

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi gambaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan dari hasil penelitian (Universitas Pendidikan Indonesia, 2019). Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis meme politik yang beredar di media sosial terkait kebijakan PPKM 2021, analisis juga dilihat dari isu representasi kritik di dalamnya, analisis dilakukan dengan metode analisis semiotika yang dicetuskan oleh Roland Barthes, dimana meme politik akan dilakukan pemaknaan denotasi, konotasi, serta mitos yang terdapat pada meme politik tersebut.

Penelitian ini mengkaji terjemahan semiotik meme politik dan kemunculannya sebagai genre atau hiburan baru yang dipublikasikan dengan cepat di berbagai platform media sosial, namun meme politik tidak hanya menyampaikan makna yang beragam terkait pesan sosial dan pesan politik yang ekspresif, meme politik memberikan hiburan dan mendorong pengguna media sosial untuk mengekspresikannya. Ditemukan juga bahwa meme mempengaruhi bahasa, pemikiran, dan konsep budaya tertentu.

1.4.1 Manfaat Teori

Dari segi teori, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana semiotik bekerja dalam konteks meme politik, mengenai makna yang tersembunyi di balik gambar dan teks yang digunakan. Ini berkontribusi pada pemahaman teoritis tentang semiotik Barthes dalam studi media dan budaya.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Dari segi kebijakan, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dampak emosional dari pesan meme politik dalam konteks kebijakan publik, terutama selama pandemi Covid-19. Hal ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk lebih sensitif terhadap

reaksi masyarakat terhadap tindakan pemerintah dan meningkatkan komunikasi yang lebih efektif.

1.4.3 Manfaat Praktik

Dari segi praktik, penelitian ini memberikan wawasan berharga kepada para profesional, terutama yang terlibat dalam komunikasi publik, tentang bagaimana memahami, mengelola, atau merespons fenomena meme politik. Ini memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam mengelola pesan-pesan yang muncul di media sosial dan menghindari potensi konflik.

1.4.4 Manfaat Isu dan Aksi Sosial

Dari segi isu sosial serta aksi sosial, penelitian ini menggambarkan bagaimana masyarakat menggunakan meme politik sebagai alat untuk mengekspresikan kritik sosial mereka terhadap kebijakan publik. Ini dapat memfasilitasi diskusi publik yang lebih luas tentang isu-isu penting dan memobilisasi individu untuk berpartisipasi dalam aksi sosial yang relevan.

1.5 Struktur Organisasi

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti memaparkan topik yang diangkat yaitu analisis semiotika terhadap representasi kritik dari meme politik terkait kebijakan publik. Peneliti juga merumuskan fokus, sasaran, kegunaan dan struktur penelitian di bab ini.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Peneliti memaparkan konteks sejelas-jelasnya terhadap analisis semiotika terhadap representasi kritik dari meme politik terkait kebijakan publik dengan menunjukkan konsep, teori, penelitian terdahulu sebagai referensi, dan posisi teori semiotika terhadap representasi kritik dari meme politik terkait kebijakan publik.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan desain penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, hingga langkah analisis dan validitas data yang akan dijalankan.

4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menyajikan hasil analisis data dari penelitian analisis semiotika terhadap representasi kritik dari meme politik terkait kebijakan publik.

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bab ini, peneliti memaparkan simpulan dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan dari penelitian juga mengajukan hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian analisis semiotika terhadap representasi kritik dari meme politik terkait kebijakan publik.